#### PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTA PRABUMULIH

#### Oleh

Masri Ermawijaya Masriermawijaya60@gmail.com Prodi Akuntansi STIE Rahmaniyah

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kuantitatif dengan melakukan perhitungan atas kuesioner yang disebarkan terhadap 25 responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan sangat baik dengan rata-rata skor penilaian sebesar 87,98%. Hal ini dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih telah menerapkan Good Corporate Governance (prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran dengan sangat baik). Hal ini dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih telah menerapkan melaksanakan praktek bisnis yang konsisten, kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan, memaksimalkan value perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparansi dan efisien, serta memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Good Corporate Governance, Kinerja

## I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perbankan berasaskan demokrasi ekonomi yang memiliki tugas utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dengan fungsi tersebut, bank berperan strategis dalam menunjang pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Perkembangan perekonomian yang bergerak cepat harus selalu diikuti secara tanggap oleh

perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance di Indonesia masih tergolong lemah. Untuk itu pemerintah pada tahun 2004, membentuk Komite Nasional Governance (KNKG) melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Dibentuknya KNKG masih belum memberikan perubahan yang signifikan bagi perkembangan Good Corporate Governance di Indonesia. Melalui Asian Corporate Governance Association (ACGA) pada Tahun 2018, menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangganya dalam bidang pengelolaan perusahaan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance antara lain: transparancy, independency, accountabillity, responsibillity, serta fairness. Prinsip Good Corporate Governance diterapkan agar terwujudnya keterbukaan informasi adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-hak sebagai karyawan maupun adanya keterlibatan dari seluruh karyawan dalam pengembangan organisasi serta dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan dan kesalahan pengelolaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal kepada stakeholder.

Hasil survey dari WorlD Bank mengenai penerapan *Corporate Governance* di Indonesia tahun 2004 pun menunjukkan bahwa penerapan hukum dan peraturann perundang-undangan perlu diperkuat, dan sanksi yang ada dianggap belum terlalu efektif dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam dunia perbankan. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya operasional yang terjadi, sehingga kinerja perusahaan dianggap belum semaksimal mungkin.

PT Bank Rakyat Indonesia sebagai perusahaan BUMN dituntut untuk melaksanakan praktek *Good Corporate Governance* dengan menciptakan sistem yang berkesinambungan dan keseimbangan antara kepengurusan dengan *stakeholder* dalam berbagai bentuk pengawasan serta penciptaan pengendalian intern yang menggariskan hubungan antara dewan komisaris, direksi dan manajemen operasi.

Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Di Indonesia, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 yang menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Penerapaan *Good Corporate Governance* ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. Dalam peningkatan mutu GCG, BRI mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh the Organization for Economic Cooperation and Development. Penilaian penerapan GCG dilakukan oleh *Indonesian Institute of Corporate Directorship* (IICD) sesuai kriteria ACGS Tahun 2017 dan BRI medapatkan skor 99.53 dengan peringkat *Very Good* dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 1
ASEAN Corporate Governance Performance Index (ACGS)
PT Bank Rakyat Indonesia
Tahun 2015-2017

Tunun 2013 2017					
Prinsip	2015	2016	2017		
Hak-hak pemegang saham	8.80	8.80	8.80		
Perlakuan setara terhadap pemegang saham	12.50	12.50	12.50		
Peran pemangku kepentingan	10.00	10.00	10.00		
Pengungkapan dan Transparansi	24.39	24.39	24.39		
Tanggung jawab Direksi dan Komisaris	37.89	37.89	37.89		
Bonus	7.00	9.00	6.00		
Penalty	(2.00)	0	0		
Skor ACGS	88.55	102.05	99.53		

Sumber: www.bri.co.id, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governanve* yaitu terjadi penurunan dan penurunan kinerja tata kelola PT Bank Rakyat Indonesia. Hal ini mendorong Penulis untuk

menganalisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut yaitu Bagaimana pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih.

#### II. LANDASAN TEORI

## 2.1 Konsep Good Corporate Governance

# 2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Berdasarkan Forum Corporate Governance (FCG) (2012:10) di Indonesia, Good Corporate Governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuannya corporate governance ialah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara, *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktural yang digunakan oleh perusahaan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.

## **2.1.2 Prinsip** *Good Corporate Governance*

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada Tahun 2006. Pedoman

yang dikeluarkan pada Tahun 2006 merupakan revisi atas pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada Tahun 2001. Meskipun pedoman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi dapat menjadi rujukan bagi dunia dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

Menurut Sutedi (2012:11), ada beberapa prinsip dasar dalam *Good Corporate Governance*, yaitu :

# 1. Transparansi (*Transparency*)

*Transparency* (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (accounting system) yang berbasiskan standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan Information Technology (IT) dan Management Information System (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan enterprise risk manajemen yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasikan, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

# 2. Akuntabilitas (*Accountabillity*)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (*Financial Statement*) pada waktu yang tepat dan cara yang tepat, mengembangkan Komite Audit dan Resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan best practice (bukan sekedar audit).

## 3. Pertanggungjawaban (*Responsibillity*)

Responsibility (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tangung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tangung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

## 4. Kemandirian (*Independency*)

Independency (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

#### 5. Kewajaran (*Fairness*)

Fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-dealing dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, termasuk sistem remunerasi menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan material apa pun mengedepankan Equal Job Opportunity.

## 2.1.4. Manfaat Good Corporate Governance

Manfaat dengan dilaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesian* (FCGI) (2012:23) disebutkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

- 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.
- Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *value* dan *dividen*.

#### 2.1.5. Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan dari GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006:33) adalah:

- 1. Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good*Corporate Governance secara konsisten.
- 2. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam perusahaan tersebut.
- 3. Memaksimalkan *value* perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparansi dan efisien.
- 5. Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

#### 2.1.6 Lingkup Good Corporate Governance

Sutedi (2017:65), menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan yaitu;

- a) Perlindungan terhadap hak-hak dalam Corporate Governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.
- b) Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatmment of shareholders).
- c) Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (the role of stakeholders).
- d) Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparancy).
- e) Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (the responsibilities of the board).

## III. Metodologi Penelitian

#### 1.5.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dalam hal ini Penulis memperoleh data dengan cara observasi langsung pada objek penelitian yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih berupa hasil wawancara dan kuesioner.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa perkembangan PT Bank Rakyat Indonesia.

## 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka

Yaitu dengan cara menelaah teori-teori yang bersumber dan buku-buku teks dan jurnal yang digunakan dalam menyusun landasan teori.

## b. Penelitian Lapangan

Yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih dengan cara sebagai berikut :

#### 1) Kuesioner

yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis untuk menganalisa penerapan prinsip *good corporate governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia terhadap 25 orang pegawai.

# 2) Wawancara

wawancara berstruktur, dimana peneliti bebas mewawancarai dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

#### 2) Dokumentasi

Yaitu mendokumentasikan data-data tentang Perkembangan PT Bank Rakyat Indonesia menurut prinsip *good corporate governance*.

## 1.5.3 Operasional Variabel

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Pengertian	Indikator	Item	Skala
1	Good	Good Corporate	1. Transparansi	1-2	
	Corporate	Governance adalah sistem	(Transparency)		
	Governance	yang mengatur, mengelola	2. Akuntabilitas	3-4	
		dan mengawasi proses	(Accountabillity)		
		pengendalian usaha untuk	3. Pertanggungjawaban	5-6	
		menaikan nilai saham,	(Responsibillity)		Ordinal
		sekaligus sebagai bentuk	4. Kemandirian	7-8	Ordinar
		perhatian kepada pihak	(Independency)		
		yang berkepentingan,	<ol><li>Kewajaran</li></ol>	9-10	
		karyawan dan masyarakat	(Fairness)		
		sekitar			

Sumber: Sutedi (2012:11)

## 1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kuantitatif dengan melakukan pengolahan data kuesioner menggunakan rumus Champion dalam Violetta (2011:44), yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban "YA" kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

Persentase =	∑ Jawaban "YA"	X 100%
1 0150110us0	∑ Jumlah Kuesioner X Jumlah Pertanyaan	11 100/0

#### Keterangan:

Σ Jawaban YA: seluruh penjumlahan jawaban YA yang di jawab oleh responden dalam

kuesioner.

Σ Jumlah Kuesioner : seluruh penjumlahan kuesioner yang beredar yang wajib diisi oleh para

responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Jumlah Pertanyaan : Pertanyaan yang ada dalam kuesioner berdasarkan klasifikasinya

masing-masing.

Tabel 3 Kriteria Penilaian Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* 

Persentase	Kriteria		
0%-25% Good Corporate Governance Kurang			
26-50%	Good Corporate Governance Sedang		
51%-75%	Good Corporate Governance Baik		
76%-100%	Good Corporate Governance Sangat Baik		

Sumber: Violetta (2011:44)

#### IV. PEMBAHASAN

## 4.1 Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini Penulis menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu pengawai PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sebanyak 25 orang pegawai yang tersebar di bagian atau departemen AO Komersial, petugas ADK, supervisor pelayanan kas, pimpinan cabang beserta asisten bisnis dan bagian pendukung lainnya.

# 4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada perilaku seseorang. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4 Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	14	56%
Perempuan	11	44%
Total	25	100%

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

## 4.1.2 Umur Responden

Umur dadalah sebagai gambaran akan pengalaman dan tanggung jawab individu. Tabulasi umur responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5 Karekteristik Responden berdasarkan Umur Responden

Umur	Jumlah	Persentase (%)
23-28	2	8%
29-34	7	28%
> 35	16	64%
Total	25	100%

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

# 4.2 Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih

Good Corporate Governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pimpinan pusat, pimpinan cabang, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuannya corporate governance ialah menciptakan nilai tambah bagi semua

pihak yang berkepentingan. Sutedi (2012:11), mengemukakan beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Good Corporate Governance*, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountabillity*), Pertanggungjawaban (*Responsibillity*), Kemandirian (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan Penulis menggunakan rumus *Champion* dalam Violetta (2011:44), yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban "YA" kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$Persentase = \frac{\sum Jawaban "YA"}{\sum Jumlah Kuesioner X Jumlah Pertanyaan} X 100\%$$

Berikut rekapitulasi jumlah pertanyaan dan jumlah jawaban dari penyebaran kuesioner tentang prinsip *Good Corporate Governance*:

Tabel 6 Jumlah Pertanyaan, Responden dan Jawaban Kuesioner

No	Prinsip Good Corporate Governance	Jumlah Pertanyaan	Jumlah Responden	Jumlah Jawaban
1	Transparansi (Transparency)	4	25	100
2	Akuntabilitas (Accountability)	6	25	150
3	Pertanggungjawaban (Responsibility)	5	25	125
4	Kemandirian (Independency)	4	25	100
5	Kewajaran (Fairness)	4	25	100

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

## **4.2.1** Analisis Prinsip Tranparansi (*Transparency*)

Transparency (keterbukaan) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada *stakeholders*. Informasi mengenai keadaan dan kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Berikut jawaban responden terhadap penerapan prinsip transparansi pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih dalam Tabel 7

Tabel 7 Jawaban Responden terhadap Prinsip Transparansi

No	Pertanyaan	Ya	Ragu- ragu	Tidak	Total
1	Apakah pengambilan keputusan oleh manajemen dilakukan secara terbuka dan dikhususkan pada	21	3	1	25

## Ermawijaya

	pihak-pihak internal yang terkait?				
2	Apakah tujuan perusahaan ditetapkan dengan jelas?	25	ı	ı	25
3	Apakah pelaksanaan tindak lanjut berupa : a. Penyempurnaan ketatalaksanaan? b. Penyempurnaan program audit? c. Penyerahan khusus pada instansi berwenang?	18	3	4	25
4	Apakah penyebaran dan pengungkapan informasi yang material dilakukan tepat waktu dan efisien?	22	3	-	25
Jumla	h	86	9	5	100

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

Persentase = 
$$\frac{\sum \text{Jawaban "YA"}}{\sum \text{Jumlah Kuesioner X Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$
Persentase = 
$$\frac{86}{100} \times 100\%$$
Persentase = 
$$86\%$$

Jawaban responden terhadap penerapan prinsip transparansi pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih dalam menunjukkan angka 86 %, hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah menerapkan GCG sangat baik. Wujud nyata prinsip transparansi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih adalah sikap terbuka dan bertanggungjawab terhadap pihak-pihak internal yang terkait dan juga masyarakat sebagai nasabah. Adanya langkah-langkah yang tegas yang dapat menghambat masuknya debitur ataupun pihak eksternal yang ingin menanamkan modalnya, memberi kesempatan kepada masyarakat, pihak internal maupun eksternal untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan peningkatan kinerja perusahaan yang baik. Prinsip transparansi ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, adapun wujud nyata transparansi lainnya adalah:

- 1. Keterbukaan dalam hal rapat-rapat
- 2. Keterbukaan Informasi
- 3. Keterbukaan prosedur
- 4. Keterbukaan register
- 5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

# 4.2.2 Analisis Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif. Berikut jawaban responden terhadap penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih dalam Tabel 8:

Tabel 8
Jawaban Responden terhadap Prinsip Akuntabilitas

No	Pertanyaan	Ya	Ragu- ragu	Tidak	Total
1	Apakah pimpinan cabang bertindak dengan berdasarkan informasi yang lengkap, itikad baik, dan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pimpinan pusat?	23	2	1	25
2	Apakah pimpinan cabang akan mempengaruhi pimpinan pusat?	19	6	-	
3	Apakah pimpinan cabang memperlakukan semua karyawan dan nasabah secara layak?	20	3	2	25
4	Apakah pimpinan cabang memastikan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan nasabah?	19	2	4	25
5	Apakah tugas dan fungsi staff dan karyawan sudah berjalan dengan semestinya dengan adanya penerapan GCG?	25	-	-	25
6	Apakah bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan?	24	-	1	25
	Jumlah	130	13	7	150

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

Berdasarkan data pada Tabel 8 di atas, maka berikut ini disajikan perhitungan persentase terhadap prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih berdasarkan hasil jawaban kuesioner:

$$\begin{array}{ll} \text{Persentase} = & \frac{\sum \text{Jawaban "YA"}}{\sum \text{Jumlah Kuesioner X Jumlah Pertanyaan}} & \text{X 100\%} \\ \text{Persentase} = & \frac{130}{150} & \text{X 100\%} \\ \text{Persentase} = & 86,7\% & \end{array}$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 86,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah berjalan sangat baik. Pimpinan cabang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Pimpinan cabang juga bertanggung jawab untuk memberikan nasehat kepada karyawan atas pengelolaan perusahaan dan pengawasan perusahaan.

Pimpinan cabang dan segenap karyawan bertanggung jawab atas peningkatakan kinerja dengan menciptakan pelayanan yang maksimal dan memberikan pemahaman yang baik agar nasabah ataupun calon nasabah dapat mempercayakan modalnya disimpan dalam bank.

# 4.2.3 Analisis Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibility (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tangung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tangung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjada etika, serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Berikut jawaban responden terhadap penerapan prinsip pertanggungjawaban pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih dalam Tabel 9:

Tabel 9 Jawaban Responden terhadap Prinsip Pertanggungjawaban

No	Pertanyaan	Ya	Ragu- ragu	Tidak	Total
1	Apakah hak <i>stakeholders</i> yang dilindungi hukum itu dihargai?	19	5	1	25
2	Apakah perusahaan membayar pajak tepat waktu?	25	ı	ı	25
3	Apakah lingkungan disekitar perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan?	25	1	1	25
4	Apakah tanggung jawab tersebut merupakan hal yang sangat penting?	23	2	1	25
5	Apakah dengan adanya tanggung jawab perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik dari segi sektor internal maupun internal?	22	2	1	25
	Jumlah	114	9	25	125

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

Persentase = 
$$\frac{\sum \text{Jawaban "YA"}}{\sum \text{Jumlah Kuesioner X Jumlah Pertanyaan}} \quad X \ 100\%$$
Persentase = 
$$\frac{114}{125} \quad X \ 100\%$$

Persentase = 91,2%

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 91,2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip pertanggungjawaban pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah berjalan sangat baik, Hal ini karena PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang

Kota Prabumulih berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan, menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati serta perusahaan berkontribusi pada lingkungan maupun sumber daya daerah disekitarnya.

## 4.2.4 Analisis Prinsip *Independency* (Kemandirian)

Independency (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Berikut jawaban responden terhadap penerapan prinsip kemandirian pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih dalam Tabel 10

Tabel 10 Jawaban Responden terhadap Prinsip Kemandirian

No	Pertanyaan	Ya	Ragu- ragu	Tidak	Total
1	Upaya membentuk korporasi pengelolaan dalam pembiayaan dilakukan secara mandiri	18	2	5	25
2	Upaya untuk tidak melibatkan pengaruh pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip GCG	22	3	-	25
3	Upaya korporasi yang sehat. Menghindari benturan kepentingan	24	1	-	25
4	Upaya menjalankan aktivitas dengan baik dan dinamis dengan koordinasi dan komunikasi	17	6	2	25
	Jumlah	81	12	7	100

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase 81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kemandirian pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah berjalan sangat baik. Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih, prinsip kemandirian berdasarkan tingkat profesional dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, untuk itu perusahaan agar dapat memanfaatkan sumber daya dengan skala ekonomi tersedia sehingga output yang dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah dapat dicapai.

## 4.2.5 Analisis Prinsip Kewajaran (Fairness)

Fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan nasabah, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya. Berikut jawaban responden terhadap penerapan prinsip kewajaran pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih:

Tabel 11 Jawaban Responden terhadap Prinsip Kewajaran

No	Pertanyaan	Ya	Ragu- ragu	Tidak	Total
1	Upaya menetapkan prosedur standar operasional untuk melindungi kepentingan pengguna	25	-	-	25
2	Upaya menetapkan kebijakan untuk melindungi kepentingan pengguna	25	-	-	25
3	Menetapkan peran dan tanggungjawab pimpinan cabang dan manajemen	23	2	-	25
4	Upaya pengungkapan secara wajar sistem informasi	22	2	1	25
Jumlah		95	4	1	100

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

$$Persentase = \frac{\sum Jawaban "YA"}{\sum Jumlah Kuesioner X Jumlah Pertanyaan} X 100\%$$

Persentase =  $\frac{95}{100}$  X 100%

Persentase = 95%

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 95%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kewajaran pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah berjalan sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota

Prabumulih selalu memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kemajuan perusahaan.

Berdasarkan pembahasan dapat disusun rekapitulasi hasil perhitungan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih yang disajikan pada Tabel 12

Tabel 12 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuesioner *Good Corporate Governance* PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih

No.	Keterangan	Persentase (%)	Kriteria
1	Transparansi (Transparency)	86	Sangat Baik
2	Akuntabilitas (Accountability)	86,7	Sangat Baik
3	Pertanggungjawaban (Responsibility)	91,2	Sangat Baik
4	Kemandirian (Independency)	81	Sangat Baik
5	Kewajaran (Fairness)	95	Sangat Baik
Rata-rata		87,98	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

Penerapan prinsip sudah sangat baik dengan rata-rata skor penilaian sebesar 87,98%. Hal ini dikarenakan laporan yang disampaikan kepada pimpinan pusat telah menggambarkan tujuan perusahaan, memiliki kejelasan fungsi dalam pelaksanaannya, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sangat sadar bahwa pertanggungjawaban lahir karena adanya wewenang, sehingga mereka sangat bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, adanya pemanfaatan sumber daya yang baik dari perusahaan, mulai dari proses perencanaan akan input yang sesuai dengan menghasilkan ouput yang maksimal serta adanya juga pertumbuhan yang signifikan baik dalam simpanan, pembiayaan, total aktiva, dan kepercayaan yang besar dari para nasabah terhadap pelayanan yang baik serta adanya perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

# V. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penulis menarik simpulan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih sudah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan sangat baik dengan rata-rata skor penilaian sebesar 87,98%. Hal ini dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih

telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran dengan sangat baik, hal ini diwujudkan dengan telah dilaksanakannya praktek bisnis yang sejalan dijalankan secara konsisten, kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam perusahaan tersebut, memaksimalkan *value* perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparansi dan efisien, serta memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

#### 5.2 Saran

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Prabumulih, diharapkan selalu meningkatkan kinerja secara berimbang antara kepentingan internal dan eksternal, selalu berpedoman pada kebijakan, peraturan dan kode etik perbankan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan *Value* bagi perusahaan di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asian Corporate Governance Association (ACGA). 2012. CG Watch Market Sccoresreport. Jakarta: ACGA.
- Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI). 2012. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jakarta: FCGI.
- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Services.
- Hanifati, Amalia. 2017. *Implementasi Good Corporate Governance sebagai Peningkatan Kepercayaan Nasabah di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purbalingga*. https://www.google.com/amp/s/docplayer.ifo/amp. Diakses tanggal 05 Oktober 2019 pukul 12.45.WIB.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara,
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Good Coporate Governance

*Erma*и ..

- Sutedi, Andrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Edisi 1. Cetakan 2. Jal Sinar Grafika
- Tunggal, Amin Widjaja 2014. *Internal Audit, Enterprise Risk Management & Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Violetta, Tadikapury Jingga. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Bank X Tbk Kanwil X. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.